

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian di atas tentang Supervisi manajerial pengawas madrasah di kabupaten Muaro Jambi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perencanaan supervisi manajerial bahwa pengawas Madrasah di kabupaten Muaro Jambi terdapat maladministrasi disebabkan surat keputusan dari kemenag RI dan Tugas dilapangan oleh Kemenag Muaro Jambi berbeda sehingga menyebabkan ketidaksesuaian perencanaan supervisi manajerial di berbagai tingkat lembaga pendidikan. Karena setiap lembaga memiliki kebutuhan yang berbeda setiap tingkatannya. Namun daripada itu pengawas sudah membuat rencana pengawasan yang disepakati pada saat rapat POKJAWAS bersama dengan Kemenag Muaro Jambi. Penyusunan program supervisi manajerial Madrasah di kabupaten Muaro Jambi meliputi: visi misi dan Tujuan Madrasah, Kurikulum Madrasah, Pengelolaan Madrasah, Sarana dan Prasarana, Tenaga Kependidikan, Siswa, Lingkungan Pendidikan dan Penilaian sesuai dengan Kalender Akademik.
2. Pelaksanaan supervisi manajerial oleh pengawas di Kabupaten Muaro Jambi belum optimal, disebabkan ketidaksesuaian beban kerja yang diberikan dengan jam kerja dimana satu pengawas bertugas mensupervisi atau mengawasi lebih dari 25 lembaga di kabupaten Muaro Jambi. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya supervisi yang diberikan karena keterbatasan waktu. Selain itu ketidaksesuaian beban kerja pengawas madrasah menyebabkan pengawas tidak fokus pada tugas utama mereka, yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan di madrasah yang sesuai dengan keahlian dan pengalaman mereka. Penugasan pengawas tidak sesuai dengan SK, hal ini menimbulkan masalah administratif dan merugikan pengawas yang ditugaskan di luar wilayah yang tercantum dalam SK, sehingga pengawas mengalami

kesulitan dalam menjalankan tugasnya, baik dari segi koordinasi. Sehingga mempengaruhi efisiensi dan efektivitas proses pengawasan secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa penugasan pengawas madrasah harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam SK untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan yang optimal di Kabupaten Muaro Jambi.

3. Pengawas Madrasah di Kabupaten Muaro Jambi telah melaksanakan evaluasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, hanya saja hasil yang didapat tidaklah optimal dikarenakan tidak dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan disetiap lembaga. Evaluasi yang diberikan hanya bersifat administratif dan tidak praktik. Hal ini disebabkan karena banyaknya lembaga yang harus diawasi, kurangnya pelatihan Bimbingan Teknis secara khusus bagi pengawas sesuai dengan semua jenjang pendidikan mulai dari RA, MI, MTs dan MA. Selain itu, minimnya pelatihan membuat pengawas tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan madrasah. Program pelatihan yang teratur membantu pengawas untuk memahami peraturan terbaru, teknik pengawasan yang lebih efektif, dan cara mengimplementasikan kebijakan-kebijakan di lapangan. Pengawas madrasah di Muaro Jambi kurang mampu memberikan bimbingan yang tepat kepada pihak madrasah di Muaro Jambi dengan masalah manajerial dan administrasi. Pengawas madrasah seharusnya dapat memberikan arahan mengenai pengelolaan madrasah yang lebih efisien dan efektif, namun tanpa keterampilan yang memadai, pengawasan terhadap aspek manajerial di Muaro Jambi tidak berjalan dengan optimal.
4. Pelaporan dan tindak lanjut supervisi manajerial pengawas madrasah di Kabupaten Muaro Jambi tidak dilaksanakan secara optimal dan hanya pada satu tingkatan lembaga saja yaitu Madrasah Tsanawiyah, sedangkan Tingkatan lembaga pendidikan lainnya tidak dibuatkan laporan supervisi dan program tindak lanjut. Pelaksanaan pelaporan dan tindak lanjut supervisi manajerial pengawas madrasah di Kabupaten

Muaro Jambi masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan hasil supervisi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya kelengkapan laporan supervisi yang seharusnya menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap manajemen madrasah. Faktor-faktor seperti minimnya pemahaman pengawas tentang pentingnya pelaporan yang sistematis dan terbatasnya dukungan teknis turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas ini. Kelemahan dalam tindak lanjut supervisi juga menjadi isu utama yang memengaruhi efektivitas supervisi manajerial. Rekomendasi yang dihasilkan dari supervisi sering kali tidak ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pihak terkait, baik pengawas, kepala madrasah, maupun tenaga pendidik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya koordinasi antara pengawas dan madrasah, serta kurangnya mekanisme pengawasan terhadap implementasi hasil supervisi. Dampak dari pelaporan dan tindak lanjut yang tidak optimal ini adalah sulitnya mencapai peningkatan kualitas manajemen madrasah di Kabupaten Muaro Jambi. Supervisi manajerial yang seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan madrasah justru kehilangan fungsinya. Akibatnya, berbagai permasalahan manajemen, seperti perencanaan program yang tidak matang dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program, tetap terjadi tanpa solusi yang memadai.

5.2 Implikasi

Pertama, Implikasi penelitian ini pada perencanaan supervisi manajerial pengawas Madrasah di Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan adanya pentingnya pemahaman yang mendalam tentang proses administrasi dan perencanaan yang lebih terstruktur. Maladministrasi yang ditemukan dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa manajemen supervisi di madrasah belum sepenuhnya efektif dalam menerapkan prosedur administratif yang sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan pengawasan administratif perlu menjadi prioritas dalam perencanaan supervisi

manajerial untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan efisien. Dalam konteks perencanaan supervisi manajerial, maladministrasi yang terjadi dapat mempengaruhi kualitas pengawasan terhadap proses pembelajaran di madrasah. Pengawas Madrasah di Kabupaten Muaro Jambi perlu melakukan evaluasi terhadap prosedur administrasi yang ada dan merancang perencanaan supervisi yang lebih efektif, dengan fokus pada sistem yang dapat mengurangi ketidakteraturan dalam pengelolaan administrasi. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pemantauan yang lebih akurat terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan di madrasah.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi terkait pengembangan kapasitas pengawas Madrasah dalam mengelola administrasi. Pengawas Madrasah perlu diberikan pelatihan dan pembekalan terkait teknik manajerial dan administrasi yang baik, agar dapat mengidentifikasi serta mengatasi maladministrasi yang ada. Perencanaan supervisi yang berfokus pada peningkatan keterampilan administrasi pengawas diharapkan mampu memperbaiki sistem pengawasan, serta memberikan dampak positif bagi pengelolaan pendidikan di tingkat madrasah. Implikasi lainnya adalah perlunya koordinasi yang lebih baik antara pengawas, kepala madrasah, dan pihak-pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan supervisi manajerial. Dalam hal ini, maladministrasi yang terjadi seringkali disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan keselarasan antara berbagai pihak dalam sistem pendidikan.

Oleh karena itu, perencanaan supervisi yang melibatkan semua pihak akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencegah terjadinya ketidakteraturan administrasi yang merugikan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Muaro Jambi, terutama di bidang pendidikan dan kepengawasan madrasah, untuk merancang perencanaan supervisi manajerial yang lebih transparan dan terukur. Penanganan maladministrasi yang tepat dalam perencanaan supervisi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pendidikan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di madrasah dan mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kedua, Implikasi penelitian mengenai ketidaksesuaian beban kerja dengan jam kerja pada pengawas yang bertugas mengawasi lebih dari 25 lembaga di Kabupaten Muaro Jambi sangat penting untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawas memiliki beban kerja yang sangat tinggi karena harus mengawasi banyak lembaga dengan jumlah yang lebih dari 25. Beban kerja yang tidak sebanding dengan jam kerja yang ada dapat berpengaruh pada kualitas pengawasan yang dilakukan. Pengawas yang terbebani dengan jumlah lembaga yang terlalu banyak dapat mengalami kesulitan dalam memberikan perhatian yang maksimal kepada setiap lembaga yang diawasi.

Salah satu implikasi yang muncul dari ketidaksesuaian ini adalah penurunan efektivitas pengawasan. Pengawas yang harus mengawasi banyak lembaga dalam waktu yang terbatas cenderung tidak dapat memantau setiap lembaga secara mendalam. Hal ini dapat mengakibatkan adanya pengawasan yang kurang optimal, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kualitas operasional lembaga-lembaga yang diawasi. Misalnya, pengawasan terhadap kegiatan administrasi, keuangan, atau pelaksanaan program yang kurang ketat dapat menyebabkan penyimpangan atau kesalahan dalam pengelolaan lembaga.

Selain itu, ketidaksesuaian beban kerja ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan pengawas. Pengawas yang terpaksa bekerja dengan beban yang tinggi dan waktu yang terbatas mungkin akan mengalami stres, kelelahan, atau bahkan burnout. Kondisi ini tentu saja dapat mengurangi produktivitas pengawas dalam menjalankan tugasnya, serta mempengaruhi kualitas pengawasan yang dilakukan. Dalam jangka panjang, dampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental pengawas dapat mengurangi motivasi mereka untuk melaksanakan tugas dengan baik.

Implikasi lain dari ketidaksesuaian ini adalah risiko terjadinya kesalahan dalam pelaporan atau pengambilan keputusan terkait hasil pengawasan. Dengan banyaknya lembaga yang diawasi, pengawas mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk menganalisis data atau informasi yang diperoleh dengan cermat. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang kurang tepat atau bahkan tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Kesalahan ini, jika tidak segera ditangani, dapat

menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari, baik untuk lembaga yang diawasi maupun untuk pengawas itu sendiri.

Terakhir, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya penataan ulang beban kerja pengawas dan distribusi lembaga yang lebih seimbang. Jika beban kerja pengawas tidak sesuai dengan kapasitas yang ada, maka perlu ada evaluasi terhadap sistem penugasan pengawasan di Kabupaten Muaro Jambi. Peningkatan jumlah pengawas, pelatihan yang lebih intensif, atau penggunaan teknologi untuk mendukung pengawasan bisa menjadi solusi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Dengan penataan beban kerja yang lebih baik, diharapkan kualitas pengawasan dapat meningkat, dan pengawas dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan lebih sehat.

Ketiga, Dalam konteks penelitian tentang evaluasi di Kabupaten Muaro Jambi, terdapat implikasi yang penting terkait dengan penerapan evaluasi yang bersifat administratif dan tidak langsung berkaitan dengan praktik lapangan. Pertama-tama, evaluasi yang hanya mencakup aspek administratif berisiko menghasilkan pemahaman yang terbatas mengenai efektivitas kebijakan atau program yang diterapkan. Evaluasi semacam ini tidak dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat, karena tidak memperhitungkan variabel praktik yang sering kali menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program. Kedua, evaluasi administratif cenderung mengabaikan tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan di lapangan. Misalnya, aparat pemerintah atau tenaga lapangan sering kali menghadapi kendala seperti kurangnya sumber daya, infrastruktur yang terbatas, atau resistensi dari masyarakat. Tanpa adanya evaluasi yang mengkaji langsung tantangan-tantangan ini, kebijakan yang dibuat bisa tidak relevan atau tidak mampu menjawab masalah nyata yang dihadapi di tingkat lokal.

Selanjutnya, implikasi dari evaluasi administratif yang tidak terhubung dengan praktik adalah hilangnya umpan balik yang konstruktif. Proses evaluasi yang berfokus pada aspek administratif tanpa melibatkan pengamatan langsung di lapangan akan mengurangi kemungkinan untuk mengidentifikasi kesalahan atau

kekurangan dalam implementasi. Hal ini membuat perbaikan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang diterapkan menjadi lebih sulit dilakukan, karena tidak ada data atau masukan yang menggambarkan realitas situasi. Keempat, pendekatan evaluasi yang hanya mengandalkan data administratif juga dapat mempengaruhi akuntabilitas program tersebut. Tanpa evaluasi yang mengacu pada praktik dan hasil yang terlihat langsung di lapangan, sulit untuk menilai sejauh mana anggaran yang dialokasikan benar-benar efektif digunakan. Ini juga dapat mengarah pada penyalahgunaan anggaran atau ketidakjelasan dalam hal pencapaian target program yang seharusnya lebih terukur melalui pengamatan di lapangan.

Implikasi selanjutnya menunjukkan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap lembaga pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi. Semakin banyaknya jumlah lembaga pendidikan yang harus diawasi, seperti RA, MI, MTs, dan MA, memerlukan sistem pengawasan yang lebih efisien dan terstruktur. Pengawasan yang baik sangat penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Oleh karena itu, peran pengawas sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan memenuhi kebutuhan peserta didik.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengawas yang ada saat ini masih terbatas dalam hal pelatihan dan pengembangan kompetensi. Kurangnya pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jenjang pendidikan mengakibatkan pengawas kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Pengawas harus memahami kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh lembaga pendidikan pada setiap jenjang, mulai dari RA hingga MA, sehingga pelatihan yang diberikan harus relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Pelatihan Bimtek yang lebih spesifik dan berjenjang menjadi kebutuhan mendesak agar pengawas dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Misalnya, pengawas yang bertugas di jenjang MI perlu dibekali dengan pengetahuan tentang kurikulum dasar dan karakteristik siswa SD, sementara pengawas untuk jenjang MTs dan MA perlu mendapatkan pelatihan yang lebih mendalam mengenai

pengelolaan dan evaluasi pembelajaran di tingkat menengah. Dengan pelatihan yang lebih terarah, pengawas di Kabupaten Muaro Jambi dapat lebih maksimal dalam memberikan pendampingan dan evaluasi kepada lembaga-lembaga pendidikan.

Pengawasan yang tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh aspek pengembangan kurikulum dan kualitas pengajaran, menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah tersebut. Tanpa adanya pelatihan yang memadai, pengawas akan kesulitan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan dan memberikan solusi yang tepat. Dalam konteks ini, pengembangan kapasitas pengawas menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Muaro Jambi. Akhirnya, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi antara dinas pendidikan dan lembaga pendidikan dalam hal pelatihan pengawas. Dengan adanya pelatihan Bimbingan Teknis yang lebih berkualitas dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap jenjang pendidikan, pengawas dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif. Hal ini tidak hanya akan memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi, tetapi juga memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan dapat berfungsi secara optimal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Keempat, Pelaporan dan tindak lanjut supervisi manajerial yang tidak optimal dapat berdampak pada menurunnya kualitas pengelolaan madrasah. Supervisi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek manajerial, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan, berjalan sesuai standar. Ketidakefektifan pelaporan mengakibatkan pengawas sulit memetakan kebutuhan dan masalah yang terjadi di lapangan. Madrasah di Kabupaten Muaro Jambi berpotensi mengalami kesulitan dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Supervisi yang tidak tuntas dapat menyebabkan pengabaian terhadap aspek-aspek penting seperti kompetensi guru, sarana dan prasarana, serta manajemen berbasis sekolah. Akibatnya, kualitas pendidikan di madrasah tersebut tidak sesuai dengan harapan. Ketidakteraturan dalam pelaporan supervisi juga mencerminkan minimnya akuntabilitas kinerja pengawas madrasah. Hal ini dapat

mengurangi kredibilitas pengawas sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan efektivitas pengelolaan pendidikan di madrasah. Akibatnya, pengawas sulit mempertahankan legitimasi dan kepercayaan dari pihak madrasah maupun pemerintah daerah. Pelaporan yang tidak optimal mengakibatkan masalah-masalah di madrasah tidak terdeteksi secara dini. Misalnya, kendala dalam proses pembelajaran atau manajemen keuangan yang tidak efektif bisa terabaikan. Tanpa tindak lanjut yang tepat waktu, masalah ini dapat berkembang menjadi krisis yang memengaruhi keberlangsungan pendidikan. Pengawas madrasah yang tidak menindaklanjuti hasil supervisi cenderung menurunkan motivasi guru dan kepala madrasah. Mereka mungkin merasa bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen dan pembelajaran tidak mendapat perhatian yang memadai. Kondisi ini bisa menciptakan lingkungan kerja yang kurang produktif.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian di atas tentang Supervisi manajerial pengawas madrasah di kabupaten Muaro Jambi peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Perencanaan supervisi manajerial madrasah seharusnya dimulai dengan penyusunan rencana yang jelas dan komprehensif. Rencana ini harus memuat tujuan yang spesifik, langkah-langkah yang harus diambil, serta waktu pelaksanaannya. Agar rapat POKJAWAS dapat terlaksana sesuai dengan prosedur yang berlaku, rencana tersebut harus disusun berdasarkan pedoman dan peraturan yang tercantum dalam undang-undang terkait pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam supervisi mendukung pencapaian standar pendidikan yang diharapkan. Proses perencanaan supervisi manajerial harus melibatkan semua pihak yang relevan, baik dari pihak internal madrasah maupun pihak eksternal yang memiliki kewenangan, seperti pengawas pendidikan dan kepala dinas terkait. Dalam rapat POKJAWAS, sebaiknya semua peserta rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan

pendapat. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil lebih akurat dan dapat mencakup kebutuhan semua pihak yang terlibat, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Program supervisi harus disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan riil madrasah. Oleh karena itu, sebelum rapat POKJAWAS diselenggarakan, dilakukan analisis terhadap kondisi pendidikan di madrasah, termasuk kualitas pengajaran, infrastruktur, serta kemampuan manajerial dari pimpinan madrasah. Dengan demikian, supervisi yang dilaksanakan akan lebih terfokus pada area yang benar-benar membutuhkan pembenahan, yang sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam Undang-Undang Pendidikan. Selama rapat POKJAWAS dan pelaksanaan supervisi, sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan yang berlaku. Hal ini tidak hanya mencakup standar isi dan proses pembelajaran, tetapi juga standar pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan. Setiap keputusan yang diambil dalam rapat POKJAWAS harus mengedepankan prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang pendidikan, sehingga memastikan bahwa hasil supervisi tidak bertentangan dengan regulasi yang ada. Agar proses supervisi manajerial madrasah dapat terlaksana dengan baik, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang teratur. Rapat POKJAWAS harus merencanakan jadwal evaluasi yang rutin untuk memonitor kemajuan program supervisi yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi ini nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan supervisi berikutnya. Melalui sistem evaluasi yang baik, kita dapat mengetahui apakah supervisi yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan dapat menghasilkan perubahan yang positif di madrasah. Dalam rangka mendukung keberhasilan supervisi manajerial madrasah, perlu ada upaya peningkatan kapasitas pengawas pendidikan, baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan teknis. Pengawas pendidikan harus dilatih untuk memahami

sepenuhnya peraturan dan prosedur yang berlaku, termasuk hukum yang mengatur pendidikan. Oleh karena itu, dalam rapat POKJAWAS, pengembangan kompetensi pengawas harus menjadi salah satu agenda utama. Hal ini akan memastikan bahwa supervisi yang dilakukan tidak hanya sesuai dengan prosedur, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas manajerial madrasah secara keseluruhan.

2. Kemenag Kabupaten Muaro Jambi perlu melakukan evaluasi terhadap distribusi beban kerja pengawas. Dengan jumlah lembaga yang diawasi mencapai lebih dari 25 per pengawas, tugas mereka menjadi sangat berat dan sulit untuk dilakukan secara optimal. Sebaiknya, dilakukan penyesuaian jumlah pengawas berdasarkan kebutuhan ideal supervisi, mengacu pada pedoman nasional tentang rasio pengawas terhadap lembaga pendidikan. Untuk mengurangi beban kerja yang berlebihan, pemerintah daerah perlu merekrut lebih banyak pengawas yang kompeten. Dengan menambah jumlah pengawas, setiap lembaga pendidikan dapat menerima perhatian yang lebih intensif dan terarah, sehingga kualitas supervisi dapat meningkat secara signifikan. Kemudian Pemanfaatan teknologi informasi dalam supervisi dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan waktu dan sumber daya. Sistem supervisi berbasis aplikasi daring memungkinkan pengawas memantau kinerja sekolah, menyampaikan umpan balik, dan memberikan arahan tanpa harus selalu hadir secara fisik di lokasi. Selain menambah jumlah pengawas, pemerintah juga perlu memberikan pelatihan dan pengembangan profesional secara berkala. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengawas dalam melaksanakan tugas supervisi manajerial secara efektif, termasuk kemampuan memanfaatkan teknologi modern dalam pekerjaannya.
3. Banyaknya lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA), memerlukan pengawasan yang optimal. Pengawas madrasah di Muaro Jambi

dihadapkan pada tantangan besar karena jumlah lembaga yang harus diawasi tidak sebanding dengan kapasitas pengawas yang ada. Pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan jumlah pengawas untuk memastikan kualitas pendidikan di semua jenjang tetap terjaga. Minimnya pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang spesifik untuk pengawas madrasah menjadi kendala utama dalam meningkatkan kompetensi mereka. Pengawas membutuhkan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan, mengingat karakteristik dan tantangan yang dihadapi RA, MI, MTs, dan MA sangat beragam. Penyediaan pelatihan yang berbasis kebutuhan dapat membantu pengawas menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Bimtek bagi pengawas harus mencakup aspek teknis dan pedagogis, seperti manajemen kurikulum, evaluasi pembelajaran, dan pendekatan supervisi. Misalnya, pengawas di RA membutuhkan pemahaman khusus tentang pendidikan usia dini, sementara pengawas di MA memerlukan wawasan tentang pembelajaran berbasis sains atau teknologi. Dengan pelatihan yang sesuai, pengawas dapat memberikan bimbingan yang relevan bagi guru dan kepala madrasah. Selain itu, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengawasan dan pelatihan. Pemerintah dan pihak terkait dapat mengembangkan platform daring untuk pelaporan, pelatihan, dan komunikasi antara pengawas, madrasah, dan dinas terkait. Penggunaan teknologi akan mengurangi beban administrasi pengawas sekaligus memperluas akses terhadap sumber daya pelatihan. Kerjasama antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan lembaga pendidikan tinggi juga dapat membantu meningkatkan kualitas pengawasan. Perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis riset dan memberikan masukan terkait strategi pengawasan yang lebih efektif. Dengan sinergi ini, kualitas pendidikan madrasah di Muaro Jambi dapat meningkat secara signifikan. Selain pelatihan, pengawas juga memerlukan pendampingan berkelanjutan. Pemerintah dapat membentuk tim ahli yang mendukung pengawas dalam menghadapi permasalahan

kompleks di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya membantu pengawas menyelesaikan tugas mereka tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan profesional secara berkesinambungan. Untuk mewujudkan pengawasan yang optimal, diperlukan komitmen dari semua pihak, termasuk alokasi anggaran yang memadai untuk pengawasan dan pelatihan. Dengan kebijakan yang terarah dan dukungan sumber daya yang cukup, pengawas madrasah di Muaro Jambi dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal, sehingga kualitas pendidikan di semua jenjang dapat terjamin.

4. Salah satu langkah utama untuk meningkatkan kualitas supervisi adalah dengan memberikan pelatihan khusus kepada para pengawas madrasah. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan pelaporan yang terstruktur, analisis data, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut yang konkret. Kompetensi yang memadai akan membantu pengawas dalam melaksanakan tugas secara profesional dan efektif. Perlu adanya pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur format dan isi laporan supervisi. Hal ini dapat mencakup aspek evaluasi kinerja madrasah, identifikasi masalah, dan usulan perbaikan. Dengan standar yang jelas, laporan akan lebih mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi acuan untuk tindak lanjut. Pemanfaatan sistem berbasis teknologi seperti aplikasi pengelolaan supervisi dapat mempermudah pengawas dalam membuat laporan dan memantau tindak lanjutnya. Teknologi ini juga memungkinkan pengawas untuk mengintegrasikan data dari berbagai madrasah di Kabupaten Muaro Jambi, sehingga proses supervisi lebih efisien dan transparan. Supervisi manajerial tidak hanya menjadi tanggung jawab pengawas, tetapi juga membutuhkan dukungan dari kepala madrasah, guru, dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya rapat koordinasi berkala untuk membahas hasil supervisi dan menentukan langkah tindak lanjut bersama. Komunikasi yang baik akan mendorong implementasi rekomendasi secara optimal. Penting untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil supervisi

benar-benar dilaksanakan oleh madrasah. Dibutuhkan mekanisme pemantauan yang terstruktur, misalnya melalui kunjungan lanjutan atau laporan progres dari madrasah yang bersangkutan. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menyajikan rekomendasi terkait dengan pelatihan dan pengembangan kapasitas pengawas madrasah. Dengan peningkatan kompetensi pengawas dalam hal manajerial dan supervisi, diharapkan kualitas pengawasan dapat meningkat meskipun dengan sumber daya manusia yang terbatas. Oleh karena itu, pemberian pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memperbaiki kinerja pengawas madrasah di Kabupaten Muaro Jambi.

Peneliti melihat bahwa penelitian ini menawarkan wawasan baru mengenai urgensi adanya penyesuaian kebijakan terkait dengan pengawasan madrasah, terutama dalam hal distribusi tugas dan peningkatan kualitas pengawas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih baik dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Muaro Jambi.

Penelitian mengenai supervisi manajerial madrasah di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Muaro Jambi Regency, mengungkapkan beberapa temuan penting yang berkaitan dengan pengelolaan yang efektif dan tantangan yang dihadapi oleh para pengawas madrasah. Pengawasan yang Tepat dan Berkesinambungan: Supervisi manajerial di madrasah sangat bergantung pada adanya pengawasan yang kontinu dan berkelanjutan. Pengawasan tidak hanya terbatas pada administrasi tetapi juga mencakup aspek pedagogik, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Temuan dari penelitian oleh Syahril (2022) mengungkapkan bahwa kurangnya pelatihan dan orientasi yang tepat bagi pengawas madrasah seringkali menyebabkan pengawasan yang tidak maksimal, bahkan menyebabkan beban tugas yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kompetensi yang seharusnya.

Tantangan dalam Pembagian Tugas Supervisi: Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pengawas madrasah adalah pembagian tugas yang tidak merata, yang menyebabkan overload atau beban kerja yang tidak seimbang. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Saputra (2020) di Jambi menemukan bahwa pengawas sering diberi tugas tambahan yang bukan bagian dari tanggung jawab utama mereka, seperti pengelolaan administrasi dan pengawasan keuangan, yang seharusnya dikelola oleh pihak lain. Hal ini tidak hanya mengurangi kualitas supervisi, tetapi juga berpotensi menurunkan motivasi dan kinerja pengawas madrasah.

Peran Manajerial dalam Peningkatan Kinerja Madrasah: Pengelolaan yang baik dan supervisi manajerial yang berbasis pada prinsip kolaboratif menjadi kunci dalam peningkatan kinerja madrasah. Rohman (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa madrasah yang memiliki manajer yang memahami kebutuhan supervisi serta memiliki keterampilan komunikasi yang baik dengan guru dan tenaga pendidik lainnya, cenderung lebih sukses dalam mencapai tujuan pendidikan. Supervisi manajerial yang dilakukan dengan pendekatan berbasis pada kebutuhan profesional guru dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas pendidikan.